

DEMOKRASI YANG MENINDAS

M. Sidi Ritaudin

Abstrak

Indonesia kini disebut-sebut sebagai salah satu Negara *the third largest democracy in the world*, setelah India dan Amerika Serikat. Di sisi lain, Indonesia juga sebagai Negara terbesar yang berpenduduk Muslim, yang sangat akomodatif terhadap ideologi demokrasi tersebut, dengan harapan nilai-nilai ajaran Islam dapat teraplikasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Ironisnya, dengan atas nama rakyat, justru dijadikan alat elit politik dan elit pemerintah “menindas” rakyatnya, sehingga Indonesia baru lepas dari penjajah asing, tetapi masih dijajah oleh kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan di segala bidang dibanding dengan Negara-negara lain. Benarkah sistem demokrasi sesuai dengan karakter bangsa, atau malah menjadi monster yang siap memporak potandakan tatanan kehidupan NKRI.

Kata Kunci : Demokrasi, Rakyat, Politik, Pemerintah, Negara

Pendahuluan

Ada adagium yang cukup dikenal oleh publik tentang demokrasi, yaitu “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”.¹ Namun demikian, cita-cita politik yang menginginkan bentuk Negara demokrasi sering kali “jauh panggang dari api”, realitasnya aspirasi rakyat tidak terakomodir dengan baik, meskipun sistemnya sudah tersedia. Oleh karena itu ada sebahagian ahli pikir politik mengatakan bahwa sebaik apa pun sistem yang dibangun, jika pelaksanaannya tidak memiliki integritas dan komitmen, maka sia-sialah ekspektasi yang digayutkan pada sistem tersebut, sehingga ada benarnya orang bijak

¹Dalam bahasa Inggrisnya : *government of the people, government by people and government for people*. Sebuah pemerintahan dalam suatu Negara dikatakan demokratis mana kala ketiga unsur ini terpenuhi dan dapat dijalankan atau ditegakkan dalam tata pemerintahan. Lihat, Abdul Rozak, dkk (editor), *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, (Jakarta : Tim ICCE UIN Jakarta, 2005), h. 111.

M. Sidi Ritaudin: DEMOKRASI YANG MENINDAS

mengatakan bahwa yang paling penting adalah *The man behind the gun*. Bukan senjatanya atau sistemnya, tetapi bagaimana kualitas sumber daya manusianya yang tersedia yang menjadi sumber politik.

Realitas empiris berbicara bahwa partai-partai kontestan pemilu mencoba “membohongi” para konstituennya dengan “mengobral” janji, senyatanya sudah sekian kali pemilu, siapa pun pemenangnya, apa yang telah dijanjikan tidak kunjung terjelma. Sebut saja janji akan memberantas korupsi, sudah 13 tahun era reformasi berjalan, yang terjadi hanyalah era “repot nasi” bagi publik. Korupsi semakin menjadi-jadi dari kelas tri (pungli di jalanan) hingga kelas kakap, seperti pembobolan bank Century, BLBI, penggelapan pajak dan lain-lain. Dari berbagai kasus ternyata yang paling dirugikan adalah rakyat. DPR yang konon akronim dari Dewan Perwakilan Rakyat, pembela nasib rakyat, ternyata hanyalah representasi dari partai politik, tidak pernah memperjuangkan nasib rakyat, yang ada adalah mereka memperjuangkan partai, kelompok dan golongan mereka nafsi-nafsi, maka tidak sedikit orang-orang tertindas dan termarginalkan berseloroh bahwa DPR adalah akronim dari Dewan Penipu Rakyat.²

Berangkat dari realitas demokrasi semacam itulah muncul sekelompok anak muda yang apresiatif, aspiratif dan kreatif membangun kelompok dagelan yang menghibur sekaligus memberikan kritik konstruktif pada acara Televisi Swasta yang mereka namakan “Democracy”. Pada acara “Sentilan Sentilun” juga sering terungkap jeritan hati rakyat yang terhimpit oleh beratnya

² Ungkapan yang tendensius dan emosional ini sering kali penulis dengar di acara “Bedah Editorial” yang diselenggarakan oleh Metro TV setiap hari dari jam 07.00 s.d 08.00. Konon DPR itu dipilih melalui pemilu dalam kerangka mewakili mayoritas rakyat yang ada di dapilnya masing-masing, karena tidak memuaskan dan tidak aspiratif, sering kali dituduh (mungkin juga benar adanya), mereka yang duduk di DPR tersebut dikatakan sebagai orang-orang munafik, sebab tidak jujur, tidak amanah, khianat dan suka berbohong, dalam hal ini antara ucapan dan janji-janji kampanye tidak sesuai dengan perbuatannya setelah terpilih.

M. Sidi Ritaudin: DEMOKRASI YANG MENINDAS

derita yang diakibatkan oleh “hantaman” demokrasi, selain itu pula, munculnya fenomena demonstrasi, yang hampir setiap even politik diselenggarakan, oleh kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa, yang intinya memperjuangkan nasib rakyat, merupakan wujud kegagalan berdemokrasi. Artinya tujuan berdemokrasi tidak tercapai, slogan rawe-rawe rantas malang-malang putung, hanya digunakan untuk penggalangan masa, untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan demokrasi itu sendiri.

Uraian di atas semakin menegaskan bahwa asumsi Samuel Huntington bahwa munculnya gerakan prodemokrasi di seluruh belahan dunia dan keberhasilan gerakan itu di banyak Negara,³ masih perlu dipertanyakan, terutama indikator keberhasilan yang dia maksud, apa hanya sekedar melakukan pemilihan umum, tetapi mengabaikan hak-hak rakyat yang harus dipenuhi oleh Negara. Memang, tuntutan terhadap demokratisasi makin marak dalam ranah global dewasa ini, namun demikian konsistensi implemetasinya dalam ruang publik masih banyak ditemui kecurangan-kecurangan, terutama pada rakyat yang berada di pelosok pedesaan, umumnya mereka tidak berdaya dan selalu menjadi “santapan” para pemilik modal dalam bidang ekonomi, mereka selalu miskin dan kebanyakan luput dari perhatian pemerintah terutama masalah-masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta himpitan ekonomi.

Ragam Demokrasi

Demokrasi secara sederhana diartikan sebagai sistem pemerintahan yang berdaulat adalah rakyat, alias kekuasaan tertinggi suatu Negara berada di tangan rakyat, dalam Negara demokrasi rakyatlah yang memegang kedaulatan.⁴ Era sekarang, di saat bangsa Indonesia berkeinginan untuk mempertahankan dan memelihara

³Lihat Samuel Huntington, *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*, (Norman , Ok : University of Oklahoma Press, 1991), h. xiii.

⁴Lihat, Muhammad ‘Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, (Jakarta : Rabhani Press, 1998), h. 178. Tentang makna dan hakekat serta pengertian demokrasi secara etimologi dan terminologi lihat, Abd. Rozak dkk (Editor), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : ICCE UIN Jakarta, The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003), 109-144.

M. Sidi Ritaudin: DEMOKRASI YANG MENINDAS

keberlangsungan demokrasi konstitusional, maka sangat strategis sekali jika ada proses sosialisasi terhadap demokrasi yang otentik (*genuine*), guna tercapainya wawasan dan sikap bagi generasi baru untuk mengembangkan budaya demokratis serta konsisten untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Konsep demokrasi dikenal pertama kali pada tahun 450 SM yang kemudian dijabarkan oleh Pericles, negarawan Athena, sebagai pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung, kesamaan di depan hukum, pluralisme dan penghargaan pada individu. Lebih rumit lagi, demokrasi diartikan sebagai sistem dan sikap; yang pertama dapat dipahami melalui aturan-aturan yang disepakati bersama meliputi berbagai elemen kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan hukum; yang kedua, lebih ditujukan pada tingkah laku dan pola pikir yang bersifat individual⁵

Memperbincangkan persoalan demokrasi, agaknya yang relevan diungkapkan disini pendapat Soedjatmoko tentang pemikiran Bung Hatta, seperti yang dikutip oleh S. Suryontoro, yang mengatakan : “saya kira kunci atau pangkal segala pemikiran Bung Hatta ialah keyakinannya pada kedaulatan rakyat, dan dalam sejarah kehidupan politiknya, kedaulatan rakyat merupakan pokok pemikirannya”.⁶ Mohammad Hatta menegaskan bahwa :”Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat atau atas nama rakyat atas dasar permusyawaratan...Kedaulatan rakyat adalah pemerintahan yang berdasarkan pertanggungjawaban yang luas dan kekal, yang berdaulat adalah rakyat, dan yang memikul tanggung

⁵ Lihat, Ariobimo Nusantara (editor), *Membangun Kembali Karakter Bangsa Hari Depan Bangsa Ada di Tangan Anda yang Memiliki Jati Diri*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 2003), h. 26.

⁶ Dr. Soedjatmoko adalah mantan Dubes RI untuk AS dan mantan penasehat BAPPENAS, Lihat, S. Suryontoro (Penyusun), *POLEKSOS (Politik- Ekonomi – Sosial) Ajaran Bung Hatta*, (Surabaya : Penerbit PT Bina Ilmu, 1980), h.42.

M. Sidi Ritaudin: DEMOKRASI YANG MENINDAS

jawab adalah rakyat. Apabila daerah itu luas, maka permusyawaratan selalu dilakukan dengan jalan perwakilan. Tidak seluruh rakyat mengambil keputusan melainkan wakil-wakilnya.”⁷

Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Bung Hatta, Muhammad ‘Imarah menegaskan bahwa prinsip demokrasi itu menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan dan sumber hukum (*The voice of people is the voice of God*). Kekuasaan rakyat menurut sistem demokrasi, adalah milik rakyat dan melalui rakyat pula untuk mencapai kedaulatan rakyat, tujuan-tujuannya, dan kepentingan-kepentingannya. Rakyat di sini bersifat umum, dan kata Jean Jecques Rousseau bahwa kehendak umum selalu benar; bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dei*).⁸ Sedangkan sistem perwakilan (*representative*), di mana para wakil rakyat terpilih mewakili rakyat untuk menjalankan tugas-tugas kekuasaan legeslatif, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban kekuasaan eksekutif adalah perangkat demokrasi yang menjadi penyambung bagi demokrasi langsung.

Bagi ‘Imarah, yang menjadi persoalan adalah ketika demokrasi disepadankan dengan pengertian *Syura* dalam Islam, Jika dalam sistem demokrasi hak dan wewenang ada di tangan manusia, umat dan rakyat. Maka dalam sistem *Syura*, kedaulatan hukum, pada prinsipnya hak dan wewenang Allah swt yang termanifestasikan dalam syari’ah, yang merupakan buatan Allah, bukan hasil produktivitas manusia, maupun anugerah alam.⁹ Agaknya Abul A’la al-Maududi terinspirasi dari gagasan ingin memadukan antara sistem demokrasi dan sistem

⁷Lihat, S. Suryontoro (Penyusun), *POLEKSOS (Politik- Ekonomi – Sosial) Ajaran Bung Hatta*, (Surabaya : Penerbit PT Bina Ilmu, 1980), h. 9.

⁸Lihat, Muhammad ‘Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, (Jakarta : Rabbani Press, 1998), h. 178. Bandingkan dengan, Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, (Yogyakarta : Qolam, 2004), h. 32.

⁹Lihat, Muhammad ‘Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, (Jakarta : Rabbani Press, 1998), h. 180.

M. Sidi Ritaudin: DEMOKRASI YANG MENINDAS

syura inilah hingga muncul pemikiran politiknya yang terkenal, yaitu theokrasi yang dia beri istilah sendiri demikian.¹⁰

Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa konsep Negara “theokrasi” secara murni itu tidak ada, agama hanya memberikan etos, spirit dan muatan doktrinal yang mendorong bagi terwujudnya kehidupan demokratis.¹¹ Hakekat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan menekankan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Dalam konteks ini maka demokrasi dan proses demokratisasi merupakan kondisi niscaya bagi terwujudnya keadilan dan hak hak kemerdekaan seseorang. Ada berbagai corak demokrasi, di antaranya adalah demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, demokrasi *consociational*, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.¹²

Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg. Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.

¹⁰ Baca buku karya Abul A'la al-Maududi, di antaranya adalah *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung : Mizan, 1984).

¹¹Lihat, Komaruddin Hidayat, “Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi”, dalam Elza Peldi Taher (Editor), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, (Jakarta : Paramadina, 1994), h. 195.

¹² Emil Salim hanya melihat tiga hal sebagai ciri tegaknya demokrasi di suatu Negara, yaitu *sovereignty of the people*, rakyat yang memiliki kedaulatan dan memiliki hak suara secara langsung melalui perwakilan di DPR sesuai amanah konstitusi, dan adanya syura, serta adanya tanggung jawab. Penjelasan lebih komprehensif dapat dilihat pada Emil Salim “Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia”, dalam ELZA Peldi Tohir (Editor), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, (Jakarta : Yayasan Paramadina, 1994), h. 156

M. Sidi Ritaudin: DEMOKRASI YANG MENINDAS

Selanjutnya demokrasi partisipasi, yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Adapun demokrasi *consociational*, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya. Sedangkan demokrasi langsung jika rakyat mewujudkan kedaulatannya secara langsung memilih pejabat legislatif dan eksekutif, dan demokrasi tidak langsung bila rakyat memandatkan pada perwakilan- perwakilan dalam memilih pejabat eksekutif.¹³ Secara konseptual tidak ada yang salah, malah sangat bagus, akan tetapi pada tataran implementasinya, di sana-sini terdapat penyimpangan dan penyelewengan konsep demokrasi tersebut.

Fakta Demokrasi Kita¹⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implemetasinya demokrasi bermata dua, yaitu demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Affan Gaffar menegaskan bahwa demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah Negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.¹⁵ Dikotomi pemaknaan demokrasi inilah agaknya yang menjadi akar persoalan yang menyebabkan gagalnya penegakan demokrasi.

Kegagalan demokrasi kita terlihat dari jauhnya implementasi *government of the people, government by people and government for people*. Rakyat semakin tidak berdaulat, yang berkuasa hanya elite penguasa, elite pemimpin partai, elit pemerintah dan para konglomerat. Ketika ditanya tentang komitmen terhadap kontrak politik, maka jawabannya adalah demokrasi empirik, demokrasi dalam arti

¹³Lihat, Abdul Rozak, dkk (editor), *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, (Jakarta : Tim ICCE UIN Jakarta, 2005), h. 121-122.

¹⁴Istilah “Demokrasi Kita” pertama kali digunakan oleh Muhammad Hatta sebagai judul artikelnya, yang kemudian diterbitkan oleh Panji Masyarakat Jakarta, tanpa tahun, dugaan penulis sekitar tahun 1955. Jadi penulis meminjamnya untuk sub tema dalam artikel ini.

¹⁵Lihat Affan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), h.

M. Sidi Ritaudin: DEMOKRASI YANG MENINDAS

politik, bukan demokrasi normatif dan ideal seperti yang telah disepakati dalam undang-undang dasar 1945.

Demokrasi normatif hanya berada pada tataran slogan politik, seperti kesadaran akan adanya pluralism dalam kenyataannya para elit politik sangat-sangat sektarian, hanya memandang “baju” kelompok, sebut saja etika koalisi menjadi “bantalan” bahkan mengalahkan hak prerogatif dalam menentukan anggota kabinet. Nilai permusyawara-ratannya simbol belaka, sebab ketentuan sudah dibuat sebelumnya, yaitu sesuai dengan kehendak penguasa. Pertimbangan moral hanya berada di awang-awang tidak pernah *landing*. Permufakatan yang jujur dan sehat, tidak pernah terjadi, melainkan manipulasi dan korupsi dan persaingan kelompok,¹⁶ *na’uzubillah min zalik*. Dalam konteks ini T. Jacob mengatakan :”Negeri Jungkir Balik : Lurus jadi kurus, menyimpang malah kenyang... yang tidak korup adalah orang tolol.¹⁷

Pernyataan T. Jacob di atas, mempertegas kegelisahan hati rakyat yang secara kasat mata melihat para wakilnya yang tidak saja bergaya hidup hidonistis, korup dan congkak, tetapi juga praktek kotor mereka terlihat dalam melaksanakan tugas kesehariannya, yaitu setiap kali sidang, yang hadir tidak mencapai quorum, dan melakukan politik

¹⁶ Barbara Ward mengklaim sebagai salah satu indikator dari kegagalan *nation state*, seperti Negara kita ini, karena “dalam bidang politik misalnya, tanpa adanya perasaan kita sebagai masyarakat yang memiliki kebangsaan yang sama (*national community*) kita tidak mungkin mencapai penemuan yang berhasil dalam masalah pemilihan umum atau pengambilan suara, atau dalam pengaturan warga Negara untuk memperoleh hak-hak politik mereka yang sama” lihat, Barbara Wrd, *Manusia dalam Kemelut Ideologi*, (Bandung : Penerbit Iqra, 1982), h. 38. Artinya kalau ada komitmen untuk menegakkan demokrasi dalam Negara bangsa, maka semua elemen kenegaraan harus konsisten dan mentaati peraturan perundang-undangan dan menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai pandangan hidup bangsa.

¹⁷ Kegalauan hati T. Jacob melihat negerinya tercabik-cabik oleh para koruptor terlihat jelas dalam berbagai catatannya di senjakala. Lihat, T. Jacob, *Tragedi Negara Kesatuan Kleptokrasi Catatan di Senjakala*, (Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 73. Tema-tema menarik dalam buku tersebut dapat dibaca antara lain: Negara kesatuan kleptokratis, Negara penuh pencuri, Jihad lawan Korupsi, akhir hidup seorang kuroptor, hegemoni kaum parasit dan lain-lain.

M. Sidi Ritaudin: DEMOKRASI YANG MENINDAS

transaksional, seperti transaksi “jual beli pasal” dalam melakukan legislasi di DPR, sebut saja misalnya UU Tenaga Kerja, UU Kesehatan, UU BI, UU Pemekaran Daerah dan masih banyak lagi yang lainnya.¹⁸

Angin segar mendayu terlontar dari pernyataan Nurcholis Madjid yang menyiratkan sebuah harapan yaitu bahwa demokrasi merupakan sebuah proses melaksanakan nilai-nilai *civility* (keadaban) dalam bernegara dan bermasyarakat. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi.¹⁹ Nilai-nilai demokrasi inilah yang oleh Affan Gaffar disebut sebagai demokrasi normatif, seperti kejujuran, keadilan, musyawarah, pluralism, yang kesemuanya itu dalam realitas empiris sudah tidak laku lagi, plitisi kita, elit politik dan elit penguasa lebih cenderung pada ajaran Macheavilly, yaitu untuk mencapai tujuan menghalalkan segala cara.

Realitas politik dewasa ini terang-terangan bahwa cara tidak sejalan dengan tujuan. Tujuan yang baik tidak diabsahkan oleh cara yang baik, melainkan cara-cara yang bertentangan dengan moral, agama dan kultur.²⁰ Karena antara tujuan dan cara ada pertentangan, maka reaksi-reaksi yang telah menggejala dan meluas ke segenap lapisan masyarakat, deokrasi terancam ambruk dan akan mengalami kehancuran. Demokrasi tidak dapat dibayangkan akan terwujud tanpa

¹⁸Lihat “Bedah Editorial” di Metro TV, hari Senin pukul 07.00-08.00 yang dibawakan oleh Usman Kansong,

¹⁹Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002).

²⁰Mohammad Hatta, menulis : Sejarah Indonesia 10 tahun yang akhir ini banyak memperlihatkan pertentangan antara idealism dan realita. Idealism, yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil yang akan melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Realita daripada pemerintahan, yang dalam perkembangannya kelihatan makin jauh dari demokrasi yang sebenarnya. Lihat, Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, (Jakarta : Panji Masyarakat, t.th), h. 3. Kondisi ketika Mohammad Hatta menulis, yaitu sekitar tahun 60, ternyata 50 tahun kemudian belum juga ada pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya itu.

akhlak yang tinggi, oleh sebab itu, pertimbangan moral menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan politik.

Demokrasi Profan yang Menindas

Sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia maka sosok demokrasi adalah produk dan aktualisasi penalaran manusia sebagai makhluk sosial. Pretensi untuk menjustifikasi produk manusia yang bernama demokrasi tersebut melalui agama, jelas tidak akan pernah mencapai titik temu, meskipun yang menjadi subyeknya, baik agama maupun demokrasi adalah manusia, akan tetapi keduanya (agama dan demokrasi) merupakan persoalan manusia dan kemanusiaan. Dalam praktik politik, demokrasi diposisikan sebagai metode, bukan tujuan. Oleh karenanya bisa sesat dan menyesatkan. Sebab jika dijadikan tujuan, nampaknya kalangan agamawan tidak sepakat memposisikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan alias kedaulatan rakyat. Jika diposisikan sebagai metode, maka sering kali cara tidak sejalan dengan tujuan, sehingga sering tergelincir pada konsep demi tujuan menghalalkan segala cara.

Suka atau tidak, demokrasi Pancasila sebagai model adalah demokrasi yang ambigu, tidak dapat digolongkan pada model teodemokrasi dan tidak pula pada sekuler. Secara *de facto* maupun *de jure*, sejak Indonesia diproklamkan 17 Agustus 1945 demokrasi Indonesia termasuk dalam kategori Negara sekuler, karena pemimpin politik dan penguasa merupakan produk pemilu dan bukan atas nama perwakilan agama.²¹ Oleh karena itu, model demokrasi pancasila, nampaknya bersifat sekuler, sebab meskipun term pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan berarti Indonesia Negara agama dan berasaskan agama, tetapi Indonesia adalah Negara Kesatuan dan berdasarkan Pancasila.

²¹Lihat pemaparan dan ulasan Komaruddin Hidayat "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi" dalam, Elza Peldi Taher, (Editor), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, (Jakarta : Paramadina, 1994), h. 189-231.

M. Sidi Ritaudin: DEMOKRASI YANG MENINDAS

Secara ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh rakyat Indonesia sepakat bahwa pilar-pilar bangunan Indonesia itu adalah Undang-Undang dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-citanya pun sangat luhur, tergambar dari penjelasan keempat pilar tersebut, namun demikian pada tatan implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan elit politik, banyak yang “mengkambinghitamkan” demokrasi, yang hanya diukur dari sisi adanya pemilu dalam memilih perwakilan di legislatif, terlepas dari apakah penyelenggaraannya ada kecurangan atau tidak, bahkan pada level ini terjadi intimidasi, praktek-praktek politik dagang sapid an penindasan. Kalau dilihat banyaknya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, maka demokrasi kita telah gagal dan menindas. Setelah terpilih wakil-wakil mereka di DPR, kehidupan para konstituen (rakyat kecil) semakin tertindas. Karena kecenderungan elit penguasa yang korup, kehidupan hedonism dan “mbruah”.

Akhir-akhir ini (November 2011) resistensi terhadap DPR yang merupakan hasil dari gelaran Pemilu diucapkan sendiri oleh ketua DPR Marzuki Ali, lantaran pada Rapat Paripurna yang semestinya digelar jam 09.00, ketua DPR baru hadir 09.30, rapat tidak bisa dilakukan karena yang hadir dari anggota DPR masih dapat dihitung dengan jari. Pada jam 10.00 rapat terpaksa diskor karena yang hadir baru sekitar 50 orang. Ironisnya setelah hampir jam 12.00 rapat tetap dibuka meskipun yang hadir tidak qorum. Pada sisi lain, mereka menampilkan kehidupan hidonistis, halaman gedung DPR laksana showroom mobil-mobil mewah yang harga perunitnya ada yang mencapai 7 milyar, sungguh sikap yang amat melukai hati rakyat. Kegelisahan ini diungkapkan oleh Permadi dalam acara Jakarta Lawyer Club bahwa solusinya hanya dengan jalan revolusi.²²

²² Begitu kronisnya penindasan DPR atas rakyatnya, sampai-sampai dalam bedah editorial ada pemirsa yang sudah pesimis mengatakan tidak ada gunanya lagi Pemilu, ini berarti demokrasi kita sudah terancam bubar. Penulis dapatkan data ini dari acara Bedah Editorial hari Rabu 15 November 2011 di Metro TV, dan Jakarta Lawywr Club pada hari Selasa 14 November 2011 di TVOne,

M. Sidi Ritaudin: DEMOKRASI YANG MENINDAS

Demokrasi telah memakan demokrasi itu sendiri dikarenakan adanya praktek *abuse of power*, penyalahgunaan kekuasaan yang kekuasaan itu sendiri diperoleh melalui jalan demokrasi, tetapi dengan kekuasaan yang sudah diperoleh ternyata muncul *treatment* alias perlakuan yang tidak sejalan dengan subsatansi nilai-nilai demokrasi, terhadap rakyat, terutama rakyat kecil yang hanya dijadikan “alat” pengusung demokrasi, cepat dilupakan setelah pemilu dan baru diingat kembali setelah pemilu menjelang. Cara berpikir demikian ini hanya bernilai politis duniawi, oleh karenanya cenderung menindas, memakan yang lemah dan mengorbankan yang bodoh. Dengan pengalaman yang memilukan (karena menindas rakyat bangsa sendiri) dan memalukan (karena tidak bisa menata Negara sendiri), benarlah kata T. Jacob bahwa demokrasi itu bukanlah sesuatu yang ideal dan puncak peradaban manusia.²³

Fleksibilitas dan kemampuan bertindak lugas adalah dua hal sifat pemimpin yang paling dibutuhkan dewasa ini. Demokrasi tidak berarti bersikap plin plan, tidak bersikap lembek. Sikap plin plan dan lembek itu menunjukkan tidak adanya etika kepemimpinan, demokrasi akan tegak jika pemimpinnya tegas dan lugas dalam mengatasi berbagai persoalan. Demokrasi berjalan di atas relnya yang sudah digariskan, yaitu harus berpihak pada kebenaran, keadilan dan kejujuran. Sifat-sifat ini menuntun jalan kepemimpinan yang tegas, berwibawa dan tangguh. Jika jati diri pemimpin tidak demikian, adalah demokratis bila bersikap ksatria dengan mengundurkan diri dari kursi jabatan.

Demokratisasi di segala bidang agaknya masih perlu dikritisi, karena pengertian demokrasi yang secara implisit rakyat yang

²³T. Jacob, *Tragedi Negara Kesatuan Kleptokrasi Catatan di Senjakala*, (Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 73.

M. Sidi Ritaudin: DEMOKRASI YANG MENINDAS

berdaulat, secara eksplisit tidak, rakyat tidak berkuasa penuh dan dengan demikian di jaman demokrasi ini, jaman daulat rakyat ternyata kekerasan dan anarki justru yang diperoleh oleh rakyat dari para penguasa zolim yang mengatasnamakan rakyat. Fenomena ketidakpercayaan rakyat terhadap demokrasi, nampak semakin menipisnya partisipasi rakyat dalam pesta demokrasi yaitu pemilu dalam memilih wakil-wakil rakyat, di sana sini terjadi sikap apatisme rakyat terhadap kedaulatan rakyat yang tidak merakyat, nyatanya kekuasaan belum benar-benar mengabdikan bagi kepentingan massa rakyat. Indikatornya cukup jelas banyaknya rakyat yang memilih golput dalam pemilu, yaitu hampir mencapai 50 % dari rakyat pemilih.

Pengembangan demokrasi masih berhadapan dengan kendala-kendala yang kompleks, mencakup dimensi sosial, ekonomi dan politik. Semuanya itu menyatu di dalam permasalahan kemiskinan, kesenjangan kaya miskin, borjuis dan proletar. Berdasarkan fakta ini, implikasi Negara demokrasi menjadi sangat luas, tidak terbatas pada persoalan pemilu saja, tetapi pengentasan kemiskinan, kebodohan, keadilan dan pemberantasan korupsi, oleh karenanya relevan agar proses perubahan berjalan sesuai dengan tata nilai, moral dan spiritual yang diinginkan oleh masyarakat majemuk di negeri ini. Oleh karena itu, pandanglah demokrasi itu sebagai sebuah metode bernegara, bukan tujuan. Maka suatu bentuk demokrasi tidak dapat diterapkan secara *taken for granted* secara kaku dan dogmatis, jika sekiranya akan merusak dan mengganggu hasil-hasil positif perkembangan Negara yang telah dicapai, justru *absurd* untuk dipaksakan.

Daftar Pustaka

- Adams, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Yogyakarta: Qolam, 2004.
- Gaffar, Affan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita*, Jakarta : Panji Masyarakat, t.th.

M. Sidi Ritaudin: DEMOKRASI YANG MENINDAS

- Hidayat, Komaruddin, “Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi”, dalam Elza Peldi Taher (Editor), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta : Paramadina, 1994.
- Huntington, Samuel, *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman , Ok : University of Oklahoma Press, 1991.
- ‘Imarah, Muhammad, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, Jakarta : Rabbani Press, 1998.
- Jacob, T., *Tragedi Negara Kesatuan Kleptokrasi Catatan di Senjakala*, Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Kamil, Sukron *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002.
- Maududi, Abul A’la al-, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung : Mizan, 1984.
- Nusantara, Ariobimo, (editor), *Membangun Kembali Karakter Bangsa Hari Depan Bangsa Ada di Tangan Anda yang Me3milki Jati Diri*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 2003.
- Rozak, Abdul, dkk (editor), *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta : Tim ICCE UIN Jakarta, The Asia Foundation dan Prenada Media, 2005.
- Salim, Emil, “Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia”, dalam Elza Peldi Tohir (Editor), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta : Yayasan Paramadina, 1994.
- Suryountoro, S. (Penyusun), *POLEKSOS (Politik- Ekonomi – Sosial) Ajaran Bung Hatta*, Surabaya : Penerbit PT Bina Ilmu, 1980.
- Wrd, Barbara, *Manusia dalam Kemelut Ideologi*, Bandung: Penerbit Iqra, 1982.

M. Sidi Ritaudin: DEMOKRASI YANG MENINDAS